

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
TERBATAS
KABUPATEN LUWU TIMUR
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:
65/Pid.B/2015/PN.MLL)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

A.MIFTAHUDDIN A.HASYIM

NIM: 10500112077

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A.MIFTAHUDDIN A.HASYIM
NIM : 10500112077
Tempat / Tgl lahir : RAPPANG, 11 September 1994
Jurusan / Prodi / Konsentrasi : Ilmu Hukum
Fakultas / Progam : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl.Perum Puri Taman Sari Blok D1 no.12
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL)"

Menyatakan dengan kesungguhan dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang tertera dalam pernyataan adalah hasil karya sendiri. Dan jika di kemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan duplikat, tiruan dan merupakan bentuk plagiat karya orang lain. Maka dengan ini skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi Hukum.

Makassar, 29 Februari 2016
Penulis


A.MIFTAHUDDIN A.HASYIM
NIM : 10500112077

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL)", yang disusun oleh saudara A. Miftahuddin A. Hasyim, NIM: 10500112077, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1437 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Maret 2016

1 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum.
Munaqisy I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Munaqisy II	: Irfan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I	: Drs. H. Munir Salim, M.H.
Pembimbing II	: Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Satu Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Merangkai kata menjadi kalimat dan merangkai kalimat menjadi satu bacaan panjang bukan hal yang mudah menyatukannya dalam suatu karya ilmiah karena diperlukan suatu gagasan pemikiran dan penalaran untuk dapat menyelesaikannya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Drs.A.Hasyim dan Ibunda Muhajirah Umar yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang secara tulus dan tanpa pamrih hingga dewasa. Serta seluruh keluarga besarku yang tiada hentinya memberikan dukungan motivasi guna menyelesaikan studiku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tercinta. Terima kasih

atas segala dukungan yang membuatku bersemangat meraih cita-cita dan menyelesaikan studiku .

Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Istiqamah, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Rahman Syamsuddin, SH., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar
4. Drs.H.Munir Salim, MH, selaku pembimbing I dan Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk atau mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr.H.Abd. Halim Talli,M.Ag, Prof.Dr.Siti Aisyah,MA.,Ph.D, dan Ahkam Jayadi, SH.,MH. selaku penguji komprehensif keislaman dan pengetahuan hukum.
6. Para bapak dan ibu dosen serta seluruh staf fakultas syariah dan hukum yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya dan pelayanan dalam penyelesaian studi mahasiswa.
7. Ketua Pengadilan Negeri Malili yakni Ibu Djulita Tandi Massora,S.H., M.H yang telah memberikan izin memberikan izin meneliti sekaligus

wawancara terkait putusan kasus yang di ambil di Pengadilan tersebut, beserta seluruh jajarannya.

8. Seluruh keluarga besar H.P.Kallo Mamba,S.H yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam penelitian skripsi ini.
9. Kepada sepupu A.Nurhana beserta suami dan juga A.Satria beserta istri yang telah memberikan dukungan dan juga membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
10. Terima kasih juga saya berikan kepada my love someone memberikan motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini
11. Terkhusus yang saudara yang tak sedarah di Study Club yang selalu ada disaat susah maupun senang, Terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
12. Kakak-kakak senior yang telah banyak menginspirasi dan memberikan masukan dalam menggarap skripsi.
13. Tidak terkecuali seluruh keluarga besar fakultas syariah dan hukum terkhusus jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012, selaku teman-teman seperjuangan dibangku perkuliahan.

Akhirul kalam, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan diRidhoi kepada pembacanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalam

Makassar, 29 Februari 2016

Penulis

A.MIFTAHUDDIN A.HASYIM
NIM : 10500112077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Tindak Pidana	
1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana	7
2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana..	15
B. Hutan	
1. Pengertian Hutan	17

2. Jenis-Jenis Hutan.....	18
3. Tindak Pidana Kehutanan	20
4. Ketentuan Hukum mengenai Illegal Logging	59
C. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	67
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data;.....	68
E. Analisis Data	68

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam perkara Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur	71
1. Posisi Kasus.....	71
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	72
3. Pembuktian.....	73
4. Tuntutan Penuntut Umum	75

5. Pertimbangan Hakim.....	75
6. Amar Putusan	84
7. Analisis Penulis	89
B. Hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur	91
C. Komentar Penulis	93
 BAB PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
BIOGRAFI PENULIS	99

ABSTRAK

NAMA PENULIS : A.MIFTAHUDDIN A.HASYIM
NIM : 105001122077
JUDUL SKRIPS : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS KABUPATEN LUWU TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALILI NOMOR : 65/Pid.B/2015/PN.MLL)

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Malili nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana *illegal logging* studi kasus putusan Pengadilan Negeri Malili nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Malili dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malili. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Malili dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malili, selain itu wawancara langsung dengan Hakim-hakim khususnya Hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber lainnya yang menyangkut objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana *illegal logging* yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang dimaksud Hakim dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah Kepala Desa, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktur Jendral, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab./Kota dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan. Dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan Hakim Pada putusan nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL. Pertimbangan Hakim sudah tepat, Baik itu dari segi motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana pidana terhadap Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad ke-21 merupakan abad dimana manusia mengalami evolusi dan kemajuan yang sangat signifikan diberbagai aspek. Beberapa hal yang dulunya belum dapat teratasi, kini dapat ditangani dengan berbagai alat modern. Namun sejalan dengan perkembangan zaman tersebut, ada beberapa dampak yang ditimbulkan, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, khususnya hutan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.¹

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang).² Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.83.

juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow, orang Yunani pada zaman dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarangpun ekstrak kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk Aspirin. Buah pohon oak merupakan makanan pokok orang Indian di samping jagung. Masyarakat nelayan Indonesia menggunakan kulit pohon bakau untuk mengawetkan Jala. masyarakat desa di sekitar hutan jati di Jawa memanfaatkan ulat jati sebagai sumber protein hewani. Sementara pada waktu ini kurang 10.000 produk yang dihasilkan dari kayu.

Pada hakekatnya hutan terdiri dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta bintang-bintang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas

tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan yang lainnya .³

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dalam dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).⁴

Kasus *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan di Luwu Timur apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *illegal logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.

Islam juga menerangkan dan memberikan peringatan kepada umat manusia agar tetap menjaga alam . Dalam Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

³<https://imankuncoro.wordpress.com/2008/08/> diakses pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2015

⁴Richard Stewart and james E. Krier, *Environmental law and policy.*, dalam Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada), h 3-5

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan olehnya itu manusia hendaknya menghentikan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan di bumi dan hendaknya mengganti atau melakukan hal-hal yang baik dan dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas , mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tidak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar demi kepentingan ekonomi yang terjadi di kawasan hutan di daerah Luwu Timur.

Olehnya itu peneliti akan difokuskan pada judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 65/Pid.B/@2015/PN.MLL).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang telah di setuju dan agar tidak menyimpang dari judul maka penulis menfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal loging* di kawasan hutan produksi terbatas kabupaten Luwu Timur dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL ?

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Luwu Timur studi dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL ?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* di Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini penelitian difokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini yakni:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas kabupaten Luwu Timur.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Luwu Timur

2. Kegunaan penelitian

- a. Agar dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada Pemerintah setempat mengenai hal yang berkaitan tentang *illegal logging*.

- b. Agar hasil dari penelitian ini menambah kepustakaan keilmuan dan dapat menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian pidana dan tindak pidana

1. Pidana dan Jenis-jenis Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum, karena hukum sudah lazim terjemahan dari *Recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja di jatuhkan / diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (Sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. J.M van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²

Mencantumkan Pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 24-25.

²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 2.

membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.³

Berdasarkan buku kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama bagi hukum pidana telah membagi jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di Indonesia dan mendapat sorotan seluruh kalangan masyarakat setempat maupun masyarakat dunia. Berbagai macam pendapat yang pro dan kontra terhadap pidana mati tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁴ Sebuah hukuman mati dilakukan berdasarkan penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964, juga tercatat di dalam lembaran negara 1964 nomor 38. Penetapan ini kemudian diundangkan 27 April 1964 melalui UU No 2/Pnps/1964 dan ditetapkan jadi Undang-Undang dengan UU Nomor 5 tahun 1969.

³Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, h. 25.

⁴Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, h. 29.

2) Pidana Penjara

Menurut Sudarto, pidana pencabutan kemerdekaan lazim disebut pidana penjara. Pidana penjara bukan pidana yang mencabut semua kemerdekaan seorang terpidana, melainkan hanya mencabut kemerdekaan bidang tertentu (misalnya kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan anggota masyarakat umum) dan pembatasan kemerdekaan (misalnya pembatasan dalam berkomunikasi).⁵Pada Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya terpidana ditempatkan pada suatu Lembaga Perasyarakatan dan wajib tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Dalam Pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatihan pidana penjara, yaitu :

- a) Pidana penjara lamanya seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih Hakim antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.⁶

⁵Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo. 2014), h.26-27.

⁶Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.6.

3) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya tempat tidur, seliut, dan lain-lain.⁷

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan. Pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umur pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

⁷ Laden Marpaung, , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* , h 109.

- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksesuksi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).⁸

4) Pidana Denda.

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diacamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h.39

- b) putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Hukuman denda tersebut boleh dibayarkan oleh siapa saja. Artinya, baik keluarga ataupun kenalan dapat melunasinya⁹.

5) Pidana Tutupan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu atau akibat adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.¹⁰

a. Jenis-jenis pidana tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijk daad*) tidak diperkenankan pada Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja.

⁹Laden Marpaung, , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* , h 109-110.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaga Negara untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/ TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Adapun sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya akan tetapi dalam waktu sementara saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.¹¹

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu.

Perampasan barang suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Maka yang diperkenankan untuk dirampas adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h.44-45

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu:

- a) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹²

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan Hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan Hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui

¹²Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, h.21.

surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.¹³

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumukakann kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap siterhukum. Biasanya ditentukan oleh Hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya siterhukum. Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan Hakim” dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP).¹⁴

2. Tindak pidana dan Unsur-unsurnya

Dalam KUHP tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* (tindak pidana) sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaarfeit*.

Menurut Hazewinkel-Suringa merumuskan pengertian dari tindak pidana dimana merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁵

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h.53-55.

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, h.112-113.

¹⁵ Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.178-179.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.¹⁶

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir.

Menurut Barda Nawawi Arief, 3 masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah yang saling terkait adalah :

- 1) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- 2) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu, dan;
- 3) Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.¹⁷

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah *In concref*, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.¹⁸

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h 58.

¹⁷ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.136.

¹⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.57-58

B. Tinjauan umum tentang hutan

1. Pengertian hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹⁹

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁰

Pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimana hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.²¹

Perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

¹⁹Salim, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi(Jakarta: Sinar Grafika,2006), h.38.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pmberantasan Pengerusakan Hutan.

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.²²

2. Jenis-jenis hutan

Dalam menerapkan program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan.

Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

Hutan berdasarkan statusnya, yaitu :

- a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.²³

Terdapat pembagian dalam hutan produksi, dan untuk lebih spesifiknya terbagi atas :

- 1) Hutan produksi tetap, merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- 2) Hutan produksi yang dapat dikonversi, merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi penambang transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan serta juga kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestari.
- 3) Hutan produksi terbatas, merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan.

terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.²⁴

3. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam Bab IV tentang Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan dan ketentuan pidana diatur dalam Bab X. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Pasal 11

- 1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- 2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- 3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

²⁴<http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/10/hutan-produksi.html>, diskres tanggal 26 Oktober 2015.

- 4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. -Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 13

- 1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- 2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- 1) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

2) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 18

- 1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- 2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pasal 20

Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 21

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

Pasal 22

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Pasal 25

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

Pasal 27

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- h. lalai dalam melaksanakan tugas.

Pasal 82

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Korporasi yang:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
- b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- 2) Korporasi yang:

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

- b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Korporasi yang:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 89

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang:

- a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Korporasi yang:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Korporasi yang:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 96

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang:

- a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda

paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 100

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 101

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 102

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

Setiap pejabat yang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;

- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
 - f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
 - g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 107

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 109

- 1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.

- 6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

4. Ketentuan Hukum mengenai *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminologi dalam Kamus Kehutanan definisi *illegal logging* dijelaskan secara terpisah. *Illegal* artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, *Logging* adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.²⁵

Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan social politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai factor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnyapengendalian dan pengawasan terhadap operasinalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan

²⁵Alam setia Zein. *Kamus Kahutanan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2003), h 75 dan 102.

menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan lainnya yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.²⁶

Kewenangan pemerintah sebagai pemegang peran dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan dituangkan dalam Undang-Undang Kehutanan pada pasal 4 dan juga diatur dalam Undang-Undang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dimana menyebutkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁷

Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa *illegal logging* secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.²⁸

Menurut Prasetyo, ada 7 dimensi dari kegiatan *illegal logging* yaitu:

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *logging* yang sesuai peraturan;
3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;

²⁶Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: Mandar Maju.2015), h.4-5.

²⁷ Wartiningsih. *Pidana Kehutanan* (Malang: Setara Press. 2014), h.23.

²⁸Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika.2010), h.298.

4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnyanya kayu;
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *illegal logging* (pembalakan liar) sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagian kelompok menyebut *illegal logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.²⁹ Namun esensi dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.³⁰

Selain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga diatur dalam PP Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dimana keduanya mengatur dua macam perbuatan pidana yakni kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan

²⁹Soeroso Ono dkk, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358* (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).2015), h.95.

³⁰IGM. Nurdjana dkk. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005), h.15.

dan atau pelanggaran. Aturan tersebut diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* sebagai instrument pelengkap.

Tindak pidana *illegal logging* juga diatur di luar bidang kehutanan yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan *illegal logging* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan.

Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa

barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).³¹

UU No. 18 tahun 2013 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *illegal logging* yaitu :

1. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan .

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

³¹Tuty Budi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Februari 2015).

C. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim

Hakim dalam memimpin sidang harus tegas dan berwibawa, tapi cukup ramah dan berbudi pekerti luhur . Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dihadapi dengan tenang dan sabar. Di dalam persidangan Hakim sebelum memeriksa dan mengadili perkara terlebih dahulu mempelajari, meneliti saksi-saksi, berkas pemeriksaan pendahuluan dan soal penahanan secara teliti, karena hal itu menyangkut hak asasi manusia, hak asasi tertuduh.

Merupakan pertanggungjawaban Hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusan itu terhadap masyarakat dan negara di dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuat dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Beradarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua Pengadilan Negeri Malili mengatakan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim itu harus merupakan suatu keseluruhan yang lengkap, tersusun satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan satu sama lain. Pertimbangan putusan itu harus memberi gambaran, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan sesuai dengan penyusunan yang dilakukan dalam urutan tertentu, yang sebaiknya diikuti terdiri

daripertimbangan yuridis dan fakta yang ada dalam persidangan, dengan secara singkat isi tiap barang bukti hendaknya di rumuskan dalam pertimbangan.³²

Dalam menjatuhkan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:³³

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim merupakan benteng terakhir keadilan sering kali dalam melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan tidak lepas dari problematika untuk meramu dua dunia yang secara diametral berbeda. merupakan pekerjaan yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atautkah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal.

³²Khaerul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, Malili, 3 Februari 2016.

³³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.91.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, terkait dengan kasus *illegal logging* di Kabupaten tersebut penulis lebih terfokus dalam mengkaji Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malili juga pada Dinas Kehutanan Kab/Kota Malili. alasan kenapa penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Luwu Timur karena di Kabupaten tersebut sering terjadi praktek *illegal logging* dan jumlah kasus yang ditangani semakin meningkat tiap tahunnya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkaji berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

C. Sumber Data

Data primer; yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yakni data yang diambil dari lokasi penelitian yakni putusan Hakim Pengadilan Negeri Malili pada suatu kasus tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Malili juga pada Dinas Kehutanan setempat. Data sekunder; yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, seperti data yang diambil dari beberapa buku referensi yang terkait dengan pembahasan *illegal logging*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Malili. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti:

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Wawancara,

Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis mengadakan intraksi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Malili atau orang-orang yang bersangkutan.

E. Analisis Data

Data-data yang diperoleh berdasarkan data primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu penulis mendeskripsikan secara singkat tentang Kabupaten Luwu Timur :

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km². Sekitar 11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.¹

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan , Indonesia . Kabupaten ini merupakan pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003.²

Secara Administratif kewilayahan Luwu Timur memiliki 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Dimana beribukotakan Malili yang terletak di ujung utara Teluk Bone.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan akhir tahun 2010 tercatat luas Hutan Lindung adalah 235.998,34 Ha, luas Hutan Produksi adalah 117.940,98 Ha. Sementara itu luas kawasan konservasi adalah

¹Pemerintah Kabupaten Luwu timur. "Geografis". Website Kabupaten Luwu Timur, www.luwutimurkab.go.id (15 Februari 2016).

²"LuwuTimur", Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur (15 Februari 2016)

183.624,08 Ha. Ada tiga jenis produksi kayu hutan yang diproduksi di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis. Diantara ketiga jenis kayu tersebut, kayu bulat yang paling banyak diproduksi yaitu sebanyak 44.297,84 m³.³

Hasil hutan yang utama di Kabupaten Luwu Timur adalah kayu yang berasal dari hutan alam, sedangkan dari hutan tanaman rakyat antara lain gemelina dan albasiaf. Luas hutan di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah:

- Hutan Lindung	235.998,34 ha
- Hutan Suaka Alam (HSA) dan Hutan Wisata	183.624,08 ha
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	88.252,57 ha
- Hutan Produksi biasa (HP)	7.940,13 ha
- Hutan Konversi (HK)	21.748,28 ha
- Hutan dengan tujuan khusus	744,30 ha

³Pemerintah Kabupaten Luwu timur. “Kehutanan”. Website Kabupaten Luwu Timur, www.luwutimurkab.go.id (15 Februari 2016).

Berdasarkan data kasus *illegal logging* yang telah ditangani Pengadilan Negeri Malili sejak tahun 2014-2015 terdapat 14 kasus dimana didominasi tindak pidana berkebun membawa alat berkebun ke dalam hutan tanpa izin.⁴

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, yakni mengenai penerapan hukum materil kasus tersebut dan pertimbangan Hakim sesuai putusan dalam studi kasus ini.

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur

Telah dijelaskan mengenai pengertian *illegal logging*, akan tetapi sampai sekarang belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga para praktisi hukum menafsirkan pengertiannya secara sendiri-sendiri mengenai istilah tersebut. dalam kasus tindak pidana *illegal logging* ketentuan pidananya diatur pada pasal 12 sampai dengan pasal 28 dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 82 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Berdasarkan data kasus yang diambil di Pengadilan Negeri Malili, dalam putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL sebagai berikut.

1. Posisi Kasus

Kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan produksi terbatas di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur posisi kasus sebagai berikut :

⁴Khaerul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, Malili, 3 Februari 2016.

Awal kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 11.30 wita, adanya laporan informasi dari warga masyarakat yang masuk ke Polres Luwu Timur Kelurahan Malili tentang adanya kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Tower 6 Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu. Kemudian dari pihak Polres Luwu Timur mengirim 2 Anggota Polri yakni Brigpol Afrianse dan Brigpol Abdul Malik untuk menanggapi dan menyelidiki perihal laporan tersebut. Dari hasil penyelidikannya tersebut Brigpol Afrianse dengan rekannya Brigpol Abdul Malik menemukan kayu olahan 3 cm x 25 cm x 400 cm = 18 Pcs, 2 cm x 25 cm x 400 cm = 40 Pcs, 5 cm x 15 cm x 400 cm = 5 Pcs, 10 cm x 10 cm x 300 cm = 8 Pcs, 5 cm x 10 cm x 400 cm = 17 Pcs, 5 cm x 15 cm x 300 cm = 15 Pcs, 5 cm x 12 cm x 300 cm = 1 Pcs di lokasi Tower 6 dimana lokasi tersebut berada pada titik koordinat 0239,28,5''E 121,15''38,2'' dimana terletak dalam areal kawasan hutan produksi terbatas dan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa kayu olahan tersebut milik Ali bin Aras Lamba alias Bapak Enjel warga Dusun Togo Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Brigpol Afrianse bersama rekannya Brigpol Abdul Malik menuju ke kediaman Ali bin Aras Lamba alias Bapak Enjel di Dusun Togo dan melakukan penangkapan.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang isinya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 22.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b. Perbuatan terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK

ENJEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Jo. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

Kedua

Bahwa ia terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 22.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c. Perbuatan terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Jo. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

3. Pembuktian

Adapun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan kasus ini sebagai berikut :

- Keterangan saksi-saksi

1. Saksi AFRIANSE (disumpah)

Saksi AFRIANSE adalah seorang anggota Kepolisian di Polres Luwu Timur yang mendapatkan laporan dari masyarakat, menemukan barang bukti kayu olahan milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

2. Saksi ABDUL MALIK (disumpah)

Saksi ABDUL MALIK adalah seorang anggota Kepolisian di Polres Luwu Timur yang mendapatkan laporan dari masyarakat, menemukan barang bukti kayu olahan milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

3. Saksi Ujan SUWARNO, S.Hut (disumpah)

Saksi Ujan SUWRNO, S.Hut adalah saksi ahli petugas Polisi Kehutanan yang pekerjaannya adalah operator System Informasi Geografis (SIG).

4. Keterangan Terdakwa

- Bukti surat

Bahwa dalam perkara ini tidak ada alat bukti surat yang diajukan di persidangan.

- Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dalam ke depan persidangan, yakni saksi dibawah sumpah saksi Saksi Afrianse, Saksi Abdul Malik, Saksi Ujan Suwarno, S.Hut yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dalam tanggapannya, serta adanya barang bukti kayu olahan 3 cm x 25 cm x 400 cm = 18 Pcs, 2 cm x 25 cm x 400 cm = 40 Pcs, 5 cm x 15 cm x 400 cm = 5 Pcs, 10 cm x 10 cm x 300 cm = 8 Pcs, 5 cm x 10 cm x 400 cm = 17 Pcs, 5 cm x 15 cm x 300 cm = 15 Pcs, 5 cm x 12 cm x 300 cm = 1 Pcs di lokasi Tower 6 dimana lokasi tersebut berada pada titik koordinat 0239,28,5''E 121,15''38,2'' dimana terletak dalam areal kawasan hutan produksi terbatas. Diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Selasa 28 April 2015 atau setidaknya pada waktu lain bertempat Tower 6 Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu telah terjadi tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah berupa kayu kelas tiga yakni kayu Tapi-tapi dan kayu Bentao yang telah diolah berbentuk papan, balok dan tiang dan Terdakwa adalah pelakunya.

- Barang buktinya berupa

kayu olahan dengan ukuran :

- 3 cm x 25 cm x 400 cm = 18 Pcs
- 2 cm x 25 cm x 400 cm = 40 Pcs
- 5 cm x 15 cm x 400 cm = 5 Pcs
- 10 cm x 10 cm x 300 cm = 8 Pcs
- 5 cm x 10 cm x 400 cm = 17 Pcs
- 5 cm x 15 cm x 300 cm = 15 Pcs
- 5 cm x 12 cm x 300 cm = 1 Pcs

4. Tuntutan Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, pada dakwaan pertama menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi semua unsur-unsurnya, sehingga Majelis Hakim mengambil dakwaan kedua. Sehingga Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c. Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Jo. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dan membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 cm x 25 cm x 400 cm = 18 Pcs
 - 2 cm x 25 cm x 400 cm = 40 Pcs
 - 5 cm x 15 cm x 400 cm = 5 Pcs
 - 10 cm x 10 cm x 300 cm = 8 Pcs
 - 5 cm x 10 cm x 400 cm = 17 Pcs
 - 5 cm x 15 cm x 300 cm = 15 Pcs
 - 5 cm x 12 cm x 300 cm = 1 Pcs
 Dirampas untuk Negara
- Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN.MLL. berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Selanjutnya saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik mendatangi lokasi di Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan menemukan sejumlah tumpukan kayu olahan.
- Selanjutnya saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik melakukan pengembangan penyidikan dan menemukan informasi bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL yang bertempat tinggal di Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Selanjutnya saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Luwu Timur untuk ditindak lanjuti.
- Selanjutnya berdasarkan interogasi kepada Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa kayu olahan tersebut adalah miliknya yang telah Terdakwa tebang dan olah menjadi papan, balok, dan tiang.
- Bahwa adapun maksud Terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan produksi terbatas tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh ahli Ujan Suwarno, S.Hut. adalah untuk dijual atau untuk dikomersilkan.

Perbuatan terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Jo. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan.

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Tower 6 Desa Balambano Kecamatan

Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Selanjutnya saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik mendatangi lokasi di Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan menemukan sejumlah tumpukan kayu olahan.
- Selanjutnya saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik melakukan pengembangan penyidikan dan menemukan informasi bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL yang bertempat tinggal di Dusun Togo Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Selanjutnya saksi Afrianse bersama-sama dengan saksi Abdul Malik mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Luwu Timur untuk ditindak lanjuti.
- Selanjutnya berdasarkan interogasi kepada Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa kayu olahan tersebut adalah miliknya yang telah Terdakwa tebang dan olah menjadi papan, balok, dan tiang.
- Bahwa adapun maksud terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan produksi terbatas tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh ahli Ujan Suwarno, S.Hut. adalah untuk dijual atau untuk dikomersilkan.

Perbuatan Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Jo. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Afrianse, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa, 28 April 2015 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Larona Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, saksi telah menangkap terdakwa oleh karena menebang pohon di kawasan hutan produksi terbatas;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar saksi menemukan tumpukan kayu olahan hasil penebangan di dalam hutan lindung yang berjumlah sekitar 3 (tiga) kubik;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan pemilik tumpukan kayu olahan tersebut, ternyata terdakwa mengakui kalau tumpukan kayu olahan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tumpukan kayu olahan tersebut hasil penebangan di dalam kawasan hutan di daerah tower 6, Desa Balambano;
 - Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yakni dinas kehutanan dalam melakukan penebangan pohon tersebut, maka saksi langsung menangkap terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.
2. Abdul Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari selasa, 28 April 2015 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Larona Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, saksi telah menangkap terdakwa oleh karena menebang pohon di kawasan hutan produksi terbatas;
 - Bahwa saksi mendapat informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar saksi menemukan tumpukan kayu olahan hasil penebangan di dalam hutan lindung yang berjumlah sekitar 3 (tiga) kubik;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan pemilik tumpukan kayu olahan yang ada di dalam hutan tersebut, ternyata terdakwa mengakui kalau tumpukan kayu olahan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tumpukan kayu olahan tersebut diperoleh dengan cara menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan di daerah tower 6, Desa Balambano, dimana hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;
 - Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni dinas kehutanan, maka dari itu saksi langsung menangkap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

3. Ujan suwarno, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas polisi kehutanan dan operator sistem informasi geografis (SIG) mendapat informasi dari pihak Polres Luwu Timur, ada seseorang yang melakukan penebangan pohon di Larona Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan titik koordinat lokasi yang dimaksud, pada hari Sabtu, 2 Mei 2015 bersama dengan saksi Afrianse dan saksi Abdul Malik.
- Bahwa titik koordinat lokasi tersebut, ternyata masuk ke dalam area kawasan hutan produksi terbatas, dimana setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon wajib mempunyai surat izin terlebih dahulu dari pihak Dinas Kehutanan setempat.
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, 28 April 2015 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Larona Tower 6 Desa Balambano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Timur, karena melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan penebangan pada waktu sekitar setahun yang lalu dimana terdakwa menebang pohon dengan alat *chainsaw* (gergaji mesin) didalam hutan tersebut, kemudian mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang;
 - Bahwa alat *chainsaw* (gergaji mesin) tersebut adalah milik teman terdakwa, yang saat ini terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaannya;
 - Bahwa pohon yang ditebang terdakwa adalah jenis kayu kelas tiga yakni kayu tapi-tapi dan kayu bentao;
 - Bahwa sebelum terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, terdakwa telah melakukan izin penebangan kepada kepala desa setempat bukan kepada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki surat izin dari Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 3 cm x 25 cm x 400 cm = 18 Pcs
 - 2 cm x 25 cm x 400 cm = 40 Pcs
 - 5 cm x 15 cm x 400 cm = 5 Pcs
 - 10 cm x 10 cm x 300 cm = 8 Pcs
 - 5 cm x 10 cm x 400 cm = 17 Pcs

5 cm x 15 cm x 300 cm = 15 Pcs

5 cm x 12 cm x 300 cm = 1 Pcs

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar, pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur, karena menebang pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas;
 - Bahwa benar, penebangan pohon dilakukan pada waktu sekitar satu tahun yang lalu, dengan menggunakan alat *Chainsaw* (gergaji mesin) di dalam hutan tersebut, kemudian mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang;
 - Bahwa alat *Chainsaw* (gergaji mesin) tersebut adalah milik teman terdakwa, yang saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa benar, pohon yang ditebang terdakwa adalah jenis kayu kelas tiga yakni kayu tapi-tapi dan kayu bentao;
 - Bahwa benar, terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki surat izin dari Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Luwu Timur, namun hanya izin dari Kepala Desa setempat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di

wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

- Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian terdakwa membenarkan identitas tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab di persidangan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan menunjukkan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Afrianse dan saksi Abdul Malik selaku pihak Kepolisian Polres Luwu Timur serta diketahui oleh saksi Ujan Suwarno, S.Hut. selaku petugas Polisi Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, atas dasar pengakuan Terdakwa, telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi terbatas , dengan menggunakan alat *Chainsow* (gergaji mesin) milik teman Terdakwa;
- Menimbang, bahwa pada waktu sekitas satu tahun yang lalu sebelum Terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam hutan tersebut, Terdakwa telah meminta izin kepada Kepala Desa setempat untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan, lalu setelah mendapatkan izin tersebut, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon, dimana setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan telah mendapatkan izin, maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

- Menimbang, oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan Jo. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

A.1. Setiap orang;

- Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam pasal ini merupakan unsur yang sama dan telah dipertimbangkan dalam pasal sebelumnya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pasal sebelumnya tersebut, maka dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, 28 April 2015, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Larona Tower 6, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Afrianse dan saksi Abdul Malik selaku pihak Kepolisian Polres Luwu Timur serta diketahui oleh saksi Ujan Suwarno, S.Hut. selaku petugas Polisi Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, atas dasar pengakuan Terdakwa, telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas, dengan menggunakan alat *Chainsaw* (gergaji mesin) milik teman Terdakwa;
- Menimbang, bahwa pada waktu sekitar satu tahun yang lalu sebelum Terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut, Terdakwa telah meminta izin kepada Kepala Desa setempat untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan, lalu setelah mendapatkan izin tersebut, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon, dimana setelah terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut, kemudian Terdakwa mengolahnya menjadi kayu berbentuk papan, balok dan tiang di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut;
- Menimbang, bahwa pihak Kepala Desa dalam memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan adalah pihak yang tidak berwenang dalam memberikan izin mengenai penebangan pohon, sehingga izin yang diperoleh Terdakwa merupakan izin yang tidak sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 18 Pieces, 2 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 40 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 400 centimeter = 5 Pieces, 10 centimeter x 10 centimeter x 300 centimeter = 8 Pieces, 5 centimeter x 10 centimeter x 400 centimeter = 17 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 300 centimeter = 15 Pieces, 5 centimeter x 12 centimeter x 300 centimeter = 1 Pieces merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana *illegal logging*

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

6. Amar Putusan;

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Bin Aras Lamba alias Bapak Enjel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ali Bin Aras Lamba alias Bapak Enjel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 18 Pieces
 - b. 2 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 40 Pieces
 - c. 5 centimeter x 15 centimeter x 400 centimeter = 5 Pieces
 - d. 10 centimeter x 10 centimeter x 300 centimeter = 8 Pieces
 - e. 5 centimeter x 10 centimeter x 400 centimeter = 17 Pieces
 - f. 5 centimeter x 15 centimeter x 300 centimeter = 15 Pieces
 - g. 5 centimeter x 12 centimeter x 300 centimeter = 1 Pieces

Dirampas untuk negara
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan dari data yang diperoleh di atas, penerapan hukum pidana materil dalam putusan Pengadilan Negeri Malili. Dalam dakwaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dakwaan pertama tidak memenuhi unsur-unsur secara sah dan meyakinkan sehingga selanjutnya dipertimbangkan pada dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12

huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan Jo. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan sebagai berikut:

Pasal 12 huruf c :

Setiap orang dilarang:

melakukan penebangan pohon secara tidak sah

Pasal 82 ayat (1) huruf c :

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf c.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Rumusan delik sebagaimana diatur dalam dakwaan yang didakwakan dengan unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan \Pemberantasan Pengerusakan Hutan adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Yang dimaksud setiap orang dalam kasus ini adalah Terdakwa Ali Bin Aras Lamba Alias Bapak Enjel diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan

sesuai dengan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbutannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Dalam unsur ini Terdakwa Ali Bin Aras Lamba Alias Bapak Enjel telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas dengan menggunakan alat Chainsaw (gergaji mesin) milik teman terdakwa dan selanjutnya kayu olahan berukuran 3 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 18 Pieces, 2 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 40 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 400 centimeter = 5 Pieces, 10 centimeter x 10 centimeter x 300 centimeter = 8 Pieces, 5 centimeter x 10 centimeter x 400 centimeter = 17 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 300 centimeter = 15 Pieces, 5 centimeter x 12 centimeter x 300 centimeter = 1 dalam bentuk papan, balok dan tiang. Sebelum melakukan penebangan pohon di dalam hutan Terdakwa telah meminta izin kepada Kepala Desa setempat dan diberikan izin. Izin dari kepala Desa sesuai dengan ketentuan dimana merupakan pihak yang tidak berwenang dalam memberikan izin mengenai penebangan pohon, sehingga izin yang diperoleh Terdakwa merupakan izin yang tidak sah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang menjadi pertimbangan penulis. Pada dakwaan pertama yang menurut Majelis Hakim tidak memenuhi unsur secara sah dalam pasal 12 huruf b dimana menjelaskan bahwa setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimana pejabat yang dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2012 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Area Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi yakni Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab/Kota dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), disini Majelis Hakim menitip baratkan atas adanya izin dari Kepala Desa setempat sehingga Terdakwa dapat masuk dalam kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dimana menimbulkan perbedaan penafsiran terkait izin yang diberikan Kepala Desa padahal untuk memberikan izin mengelola hutan yang berhak adalah pihak yang berwenang, sedangkan pada dakwaan kedua dalam pasal 12 huruf c dimana setiap orang melakukan penebangan pohon dalam hutan secara tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Izin dari Kepala Desa merupakan pihak yang tidak berwenang dalam mengeluarkan izin dan juga bukankah izin tersebut yang dimaksud tidak ada atau memerlukan pengklarifikasian tertentu mengapa sehingga dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim sehingga dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Seharusnya yang dipakai dalam mendakwa Terdakwa yaitu dakwaan pertama karena yang menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bukan pihak berwenang dalam mengeluarkan izin dan juga izin tersebut dinyatakan tidak sah. Yang menjadi perbedaan pasal 12 huruf b dengan pasal 12 huruf c yakni terletak pada perbuatan penebangan hutannya yang dilarang, dimana melakukan

penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maksudnya penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang dalam mengeluarkan izin pemanfaatan hutan sudah ada aturan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan akan tetapi jika ingin mengolah hutan tersebut harus ada izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan izin sehingga diperbolehkan untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan, sedangkan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, ada izin yang dikeluarkan akan tetapi izin tersebut tidak sah menurut hukum.

Adapun sanksi pidana dalam kasus ini telah didakwakan berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Namun dalam putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 3(tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, barang bukti berupa 3 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 18 Pieces, 2 centimeter x 25 centimeter x 400 centimeter = 40 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 400 centimeter = 5 Pieces, 10 centimeter x 10 centimeter x 300 centimeter = 8 Pieces, 5 centimeter x 10 centimeter x 400 centimeter = 17 Pieces, 5 centimeter x 15 centimeter x 300 centimeter = 15 Pieces, 5 centimeter x 12 centimeter x 300

centimeter = 1 dirampas untuk negara serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

7. Analisis Penulis

Pertama yang harus dilihat dalam perkara ini adalah syarat formil dan materil surat dakwaan dan putusan, karena di dalam KUHAP telah diatur secara jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjadi syarat formil dari surat dakwaan yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan batal demi hukum. Jika dilihat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : 65/Pid.B/2015/PN.MLL, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjalani dasar penentuan kesalahan terdakwa;

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Surat putusan pemidanaan dengan nomor : 65/ PID.B/ 2015/ PN.MLL secara ketentuan telah memenuhi syarat tersebut.

B. Hal- Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur

Putusan Hakim merupakan hal yang terakhir dilakukan dalam persidangan yaitu Hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara. Keyakinan Hakim sebagai dasar dalam putusan Hakim memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, karena sebanyak apapun bukti yang diajukan dalam persidangan jika Hakim belum yakin dengan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa bisa saja dibebaskan atau lepas. Sehingga itu keyakinan Hakim diletakkan pada tingkat teratas oleh pembuat Undang-Undang.

Dalam kasus tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Luwu Timur dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL. Hakim telah memberikan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara. Penulis mencoba menganalisis apakah pertimbangan Hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim menimbang bahwa motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging* hanya untuk bertahan hidup dengan cara menjual hasil olahan kayu Tapi-tapi dan kayu Bentao. Dan menebang kayu di kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur bukan pekerjaan Terdakwa. Terdakwa Ali Bin Aras Lamba Alias Bapak Enjel berprofesi sebagai Petani.

b. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.

Hakim mempertimbangkan riwayat hidup Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulangpunggung keluarga dan mempunyai tanggungan.

c. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

d. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;

Dalam pertimbangan Hakim sangat penting mengetahui pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana. Berat ringannya pidana akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga tindak pidana di bidang kehutanan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

e. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis di masyarakat bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa harus mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya di bidang kehutanan. Karena memerlukan waktu yang lama untuk memperbaharui ekosistem hutan.

f. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Hakim mempertimbangkan bahwa korban dalam kasus tindak pidana kehutanan adalah negara sehingga para terdakwa wajib mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan terhadap hutan negara. Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda.

g. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan serta waktu dan tempat kejadian yang berada di pedalaman hutan.

Perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya dengan sengaja melakukan penebangan pohon.

C. Komentar Penulis

Terlepas dari pembahasan di atas, ada beberapa hal yang penulis anggap perlu dikomentari yaitu:

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan saja, dimana dalam pertimbangannya pada dakwaan pertama adanya izin dari Kepala Desa sehingga Hakim beranggapan bahwa izin tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsurnya, sedangkan pada dakwaan kedua izin yang diberikan oleh Kepala Desa dinyatakan tidak sah dikarenakan pihak yang tidak berwenang dalam memberikan izin mengenai penebangan pohon. Bukankah izin dari Kepala Desa tersebut tidak ada atau memerlukan pengklarifikasian tertentu. Disini Hakim senantiasa terbelengguh dengan penafsiran yang terbatas dengan mengacu semata-mata pada Undang-Undang.
2. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah penduduk lokal yang menetap di sekitar lokasi penebangan hutan tersebut yang juga memiliki hak untuk mengelola hasil hutan.
3. Dalam pemberian izin yang diberikan oleh Kepala Desa, dimana Kepala Desa juga wajib dipanggil sebagai saksi maupun diperiksa terkait pemberian izin yang diberikan kepada Terdakwa. Karena Kepala Desa juga berperan dalam kasus ini sebagai pemberi izin.
4. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alat yang dipakai dalam menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut adalah *Chainsow* (gergaji mesin) milik

temannya, dalam barang bukti yang diajukan di persidangan tidak terdapat alat *chainshow* tersebut. berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Ketua yang menangani perkara ini menyatakan semua barang bukti dalam perkara tindak pidana *illegal logging* diserahkan untuk negara⁵. Seharusnya pihak penyidik menyita alat tersebut karena bisa saja alat tersebut dipakai lagi untuk merusak hutan.

5. Ketidak jelasan mengenai Undang-undang menyangkut apa yang dimaksud dengan “*Illegal Logging*”. Ironisnya ketika masyarakat lokal yang mengambil kayu dari hutan untuk bertahan hidup , disamakan dengan orang atau badan hukum swasta yang melakukan pencurian dan pengerusakan hutan secara besar-besaran. Selain itu banyak tindak pidana yang ada di bagian kehutanan seperti penambangan dalam hutan, pembakaran, penebangan dan sebagainya.



⁵Djulita Tandi Massora, Kepala Pengadilan Negeri Malili, *Wawancara*, Malili, 4 Februari 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa :

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana *illegal logging* yang didakwakan Terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini menurut Hakim pejabat tersebut adalah Kepala Desa, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dimana yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Area Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industry dan Hutan Produksi yakni Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab/Kota dan Kepala Balai. Dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi

Pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 65/Pid.B/2015/PN.MLL.

2. Adapun pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, baik itu dari segi Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

B. Saran

1. Diharapkan agar Majelis Hakim lebih cermat dalam menganalisis dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada Terdakwanya dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan agar kiranya Pemerintah lebih bijak memberantas *illegal logging* dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan.
3. Diharapkan agar Pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses perizinan, jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan.

4. Diharapkan agar Pemerintah dapat lebih memperketat proses perizinan pengolahan kayu hutan agar kerusakan hutan dapat dicegah untuk menjaga kelestarian hutan di masa yang akan datang.
5. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya dapat lebih bijak menghadapi kasus-kasus ringan dan lebih mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Penulis berharap penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengusut perkara di bidang kehutanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Marwam dan Jimmy, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- IGM. Nurdjana dkk. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2005.
- Iskanda. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. 1984.
- Lamintang, Franciscus Theojoniur Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marpaung, Leden, *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- Mulyadi, Lilika. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti 2007.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: TP Bumi Aksara 2008.
- Ono, Soeroso dkk, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358*. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015.
- Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental law and policy*. New York: The hobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978.
- Salim, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar Grafika, 2006.
- Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta. Sinar grafika, 2010.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika 2008.
- Wartiningih. *Pidana Kehutanan*, Malang: Setara Press, 2014.

Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Pinologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Zein, Alam Setia. *Kamus Kahutanan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2003.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2012

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Area Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sumber lainnya :

Tuty Budi Utami, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, Jurnal di akses [ejournal.undip.ac.id /index.php /lawreform /article /download/312/209](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209) (15 Februari 2015).

Pemerintah Kabupaten Luwu timur. “Geografis”. Website Kabupaten Luwu Timur, www.luwutimurkab.go.id (15 Februari 2016).

“LuwuTimur”. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. [https://id. wikipedia.org/ wiki/ Kabupaten_Luwu_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur) (15 Februari 2016)

Pemerintah Kabupaten Luwu timur. “Kehutanan”. Website Kabupaten Luwu Timur, www.luwutimurkab.go.id (15 Februari 2016).

<https://imankuncoro.wordpress.com/2008/08/diakses-pada-hari-Rabu-tanggal-26-Oktober-2015>

<http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/10/hutan-produksi.htm>

RIWAYAT HIDUP



A.MIFTAHUDDIN merupakan anak kedua dari lima bersaudara pasangan Drs.A.Hasyim dan Muhajirah, lahir di Rappang, 11 September 1994 . Tumbuh dan berkembang dalam masa kanak-kanaknya di Kota Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam jenjang pendidkannya mulai dari Sekolah Dasar Negeri 6 Rappang tamat pada tahun 2006, selanjutnya di sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI (Yayasan Madrasah Pendidikan Islam) Rappang tamat pada tahun 2009, selanjutnya meneruskan ke jenjang berikutnya pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panca Rijang tamat pada tahun 2012.

Setelah menempuh pendidikan di kampung kemudian hijrah ke Makassar pada tahun 2012 untuk melanjutkan pendidikan pada studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama mengabdikan pada almamater aktif pada organisasi kemahasiswaan, baik intra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum maupun organisasi di luar kampus seperti Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Cabang Sidrap, Independent Low Student, Forum Alumni SMANSA Panca Rijang dan juga Study Club Rumah Ilmu.